

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH: DITINJAU DARI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PATI TAHUN 2005 - 2019

Aryanti Muhtar Kusuma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Email: aryantimuhtarkusuma@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah serta pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolok ukur untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah dengan ukuran derajat desentralisasi dan analisis regresi linier berganda (OLS) Ordinary Least Square menggunakan Eviews 7 untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uji yang dilakukan, penelitian ini lolos dari Uji Asumsi Klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, rata-rata kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Pati tahun 2005-2015 tergolong kurang yaitu sebesar 11,08%. Ini artinya bahwa sebagian besar pembiayaan kegiatan pemerintah di daerah tersebut masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Kedua, didapatkan hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2019.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, PAD, PDRB dan Jumlah Penduduk

Abstract : This research is aimed to analyze independence level of regional finance as well as influence of Gross Regional Domestic Product and Total Population to the Own-source Revenue that is as benchmarks to know the Regional Generated Income. Technique of data analysis that is used is descriptive to know how high the level of regional finance independence with degree of decentralization and multiple regression analysis with Ordinary Least Square using Eviews 7 to know the influence of Gross Domestic Regional Product and Total Population to the Own-source Revenue. Based on the test, this research got away from Classical Assumption Test. The result of this research shows that, First average of regional finance capacity in Pati Regency in the year 2005-2015 including less that 11,08%. It means that majority financing activities in this region are still very depended on central government assistance. Second, gets result that Gross Regional Domestic Product and Total Population have significant positive influence to the Own-source Revenue in Pati Regency in the year 2005-2015.

Keywords: Independence of Regional Finance, Own-source Revenue, Gross Regional Domestic Product and Total Population.

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1998, merupakan salah satu kekhawatiran di dalam perekonomian yang cukup menakutkan. Krisis yang terjadi pada masa itu akhirnya mendesak para pembuat dan pengambil keputusan untuk menghasilkan sebuah

kebijakan yang mampu memperbaiki kondisi maupun kinerja perekonomian di Indonesia yang sempat terguncang. Para pembuat keputusan memutuskan untuk melaksanakan sebuah perubahan sistem yang sekiranya dapat membawa perbaikan ekonomi Indonesia, yaitu salah satunya dengan melaksanakan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah. Perubahan paradigma tersebut dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui kembali menjadi UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal memiliki beberapa tujuan pokok, antara lain menghilangkan terjadinya kesenjangan (*imbalance*) yang ada baik kesenjangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun kesenjangan horizontal (*horizontal imbalanced*) yang terjadi antar daerah (Suyanto, 2010). Halim (2011) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan (2) ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa sumber- sumber penerimaan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari 1) hasil pajak daerah 2) hasil dari retribusi daerah 3) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4) lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus dipacu secara terus menerus pertumbuhannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD kabupaten/kota akan sangat berperan penting dalam peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat (Adriani dan Iin, 2008).

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus cepat mengidentifikasi sektor- sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (Aryanti dan Indarti, 2009).

PAD yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan Total Pendapatan daerah pada APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD

bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri (Rezki, 2016).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah. Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas/ jasa yang perlu dan disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga semakin banyak pula jasa- jasa retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia masalah utama yang dihadapi daerah otonom adalah rendahnya penerimaan PAD, sementara disisi lain potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia cukup melimpah dan potensial untuk dikembangkan begitu juga dengan Kabupaten Pati yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD. Hal ini menjadi salah satu daya tarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pati. Terlebih Pati merupakan wilayah Eks Karesidenan Pati yang merupakan pembagian administratif dalam Provinsi pada zaman Hindia-Belanda hingga tahun 1950-an. Rendahnya penerimaan PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Penerimaan PAD dan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
Tahun Anggaran 2011 – 2019 (juta)

Tahun	PAD	TPD
2019	363.824,13	2.838.625,58
2018	384.041,85	2.789.055,86
2017	428.374,75	2.747.796,35
2016	321.970,33	2.452.112,93
2015	309.365,70	2.180.994,02
2014	279.254,88	1.940.575,70
2013	169.127,41	1.720.652,92
2012	163.733,66	1.477.993,12
2011	134.475,56	1.229.009,23

Sumber: BPS Kab. Pati

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati dalam kurun waktu 2011-2019 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PAD Kabupaten Pati pada tahun 2011 sebesar 134.475,56 milyar, kemudia selalu mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 428.374,75 milyar. Tetapi pada tahun 2018 PAD turun menjadi 384.041,85 milyar dan pada tahun 2019 turun menjadi 363.824,13. Sedangkan untuk Total Penerimaan (TPD) selalu meningkat pada tahun 2011-2019. Pada tahun 2011 TPD sebesar 1.229.009,23 trilyun dan selalu mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 2.838.625,58 trilyun. Jika dilihat, maka penerimaan PAD Kabupaten Pati terhadap TPD angkanya sangat kecil yaitu tidak lebih dari 20%. Melihat kondisi tersebut, maka bisa dijadikan pedoman pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan penerimaan PAD sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

Kabupaten Pati adalah salah satu di antara kabupaten di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah otonomi daerah yang dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Besarnya kontribusi PAD Kabupaten Pati terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Penerimaan PAD dan Kontribusi Kabupaten Pati terhadap
PAD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2017 – 2019 (juta)

Tahun	Jawa Tengah	Pati	Kontribusi Pati terhadap Jateng
2017	12.547.512	428.375	3,41%
2018	13.711.837	384.042	2,80%
2019	14.112.159	363.824	2,58%

Sumber: BPS Jawa Tengah.

Berdasarkan laporan BPS Jawa Tengah diketahui bahwa penerimaan PAD Kabupaten Pati dalam kurun waktu 3 tahun mengalami penurunan. Hal ini akan berakibat pada turunnya kontribusinya terhadap Jawa Tengah. Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Pati sebesar 428.375 milyar dan berkontribusi sebesar 3,14% terhadap PAD Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2018 penerimaan PAD turun menjadi 384.042 milyar dan kontribusinya turun menjadi 2,80%. Penerimaan PAD juga turun pada tahun 2019 yaitu menjadi 363.824 milyar dan kontribusinya turun menjadi 2,58% terhadap PAD Jawa Tengah. Melihat kondisi yang demikian ini, layak bahwa Kabupaten Pati perlu memperhatikan penerimaan daerahnya yang semakin turun dalam kurun 3 tahun ini. Hal tersebut dikarenakan PAD merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan suatu daerah dalam rangka menjalankan amanah dari desentralisasi fiskal. Maka akibat dari penurunan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kemandirian fiskalnya. Oleh karena itu pemerintah daerah sudah seyakinya memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya tersebut.

PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktifitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan kenaikan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (Sukirno, 2003). Dapat dikatakan bahwa PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh keseluruhan faktor produksi yang berada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Saragih, 2003). Berbagai penelitian menemukan bahwa PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah dan Sukadria didapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Perwira dengan judul Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan Dan Jumlah Penduduk Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah menyatakan bahwa PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut merupakan data perkembangan penerimaan PDRB Jawa Tengah dan Kabupaten Pati 3 tahun terakhir.

Tabel 3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Jawa Tengah dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati Tahun 2017-2019 (milyar)

Wilayah	2017	2018	2019
Blora	21.865,83	24.637,40	25.977,45
Rembang	16.324,72	17.690,40	18.934,34
Pati	36.790,70	39.907,14	43.063,88
Kudus	97.163,85	104.056,12	110.514,05
Jepara	25.785,38	27.995,28	30.230,59
Jateng	1.172.794,52	1.268.454,78	1.362.457,38

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 3 memperlihatkan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati. PDRB Jawa Tengah dalam kurun waktu 2017-2019 selalu meningkat. Pada tahun 2017 nilainya sebesar 1.172.794,52 trilyun, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.268.454,78 trilyun serta meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 1.362.457,38 trilyun. Jika di dibandingkan dengan kabupaten lainnya di eks Karesidenan Pati, maka Kabupaten Pati menempati rangking ke 2 setelah Kabupaten Kudus, yaitu penerimaan PDRB di tahun 2017 sebesar 36.790,70 trilyun dan meningkat di tahun 2018 menjadi 39.907,14 trilyun, serta naik lagi di tahun 2019 menjadi 43.063,88 trilyun. Dari 5 Kabupaten di Eks-Karisidenan Pati urutan PDRB terbesar sampai dengan terkecil berturut-turut adalah Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Blora dan Rembang.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Alasannya sederhana, karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Dalam buku Todaro (2000) disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Semakin banyak orang maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang mempunyai bakat dan kreatif, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Pertumbuhan penduduk juga merangsang pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan mendorong "*economic of scale*" dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi.

Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan

menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah (Sukirno, 2003).

Tabel 4
Penduduk Indonesia, Jawa Tengah dan Kabupaten Pati
Tahun 2017-2019 (ribu)

Wilayah	2017	2018	2019
Indonesia	261 890,90	265 015,30	268 074,56
Jawa Tengah	34 257,90	34 490,80	34 718,20
Pati	1 246,69	1 253, 30	1 259,59

Sumber: Bps.go.id

Tabel 4 menyajikan jumlah penduduk Indonesia, Jawa Tengah dan Kabupaten Pati tahun 2017-2019. Dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk selalu mengalami kenaikan. Penduduk Indonesia pada tahun 2019 meningkat sebesar 3 059,26 juta jiwa dari tahun 2018 sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebesar 268 074,56 juta jiwa. Sedangkan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 34 490, 80 juta jiwa dan menjadi 34 490,80 juta jiwa pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 227,4 juta jiwa. Untuk Kabupaten Pati jumlah penduduk meningkat sebesar 6,29 juta jiwa dari tahun 2018 sehingga jumlah penduduk di tahun 2019 adalah sebesar 1 259,59 juta jiwa.

Dengan melihat kondisi data-data seperti adanya jumlah penduduk yang melimpah bisa dijadikan modal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang ada didaerahnya. Intinya bahwa pemerintah daerah dan masyarakat harus senantiasa berupaya mencari dan mengembangkan potensi daerah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat juga bisa berkurang. Selain itu dengan memanfaatkan adanya perusahaan baik berskala besar maupun kecil yang beroperasi di Kabupaten Pati diharapkan dapat meningkatkan jumlah PDRB. Harapan lainnya adalah berupa penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, karena sudah bekerja maka pendapatan penduduk akan mengalami peningkatan, yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian pernah dilakukan oleh Hasanur dan Zainal menunjukkan bahwa Penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kawasan Barat Selatan Aceh. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf dan penelitian yang dilakukan oleh Iman menunjukkan bahwa Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menggabungkan analisis, yaitu selain menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah, dianalisis pula faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD, hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian terdahulu hanya menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah saja ataupun hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD tanpa mengetahui terlebih dahulu tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis Kemandirian Keuangan Daerah ditinjau dari Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut merupakan landasar yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Desentralisasi

Desentralisasi menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam-macam kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi dan sebagainya. Desentralisasi fiskal mengandung makna upaya untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dengan tujuan untuk memberdayakan daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sumber penerimaan pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Pada Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Ketertanggung Fiskal

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah dibanding besarnya subsidi (grants) yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan lain-lain penerimaan.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002). Kinerja keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan (*fiscal availability*) adalah kemampuan daerah yang tersedia murni dari PAD. Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Kemandirian Keuangan Daerah

Agar dapat mengetahui kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pengeluarannya adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap total

Pendapatan Daerah. Menurut Musgrave (1991) dalam mengukur kinerjakemandirian keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah antara lain :

1. $\frac{PAD}{TPD}$
2. $\frac{BHPBP}{TPD}$
3. $\frac{Sum}{TPD}$

Dimana:

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
BHPBP	= Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
TPD	= Total Penerimaan Daerah
Sum	= Sumbangan dari Pusat

Adapun untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal digunakan kriteria derajat desentralisasi daerah yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) sebagai berikut :

- a. 0,00% s/d 10% : sangat kurang
- b. 10,1 s/d 20% : kurang
- c. 20,1% s/d 30% : cukup
- d. 30,1% s/d 40% : baik
- e. 40,1% s/d 50% : sangat baik
- f. > 50% : memuaskan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Menurut Sadono Sukirno 2004 ada 3 cara untuk menghitung PDRB yaitu:

Cara Produksi

Nilai seluruh produksi diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai produksi yang dihasilkan oleh berbagai industri yang ada dalam perekonomian.

Cara Pengeluaran

Nilai seluruh produksi dari pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan rumah-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah

Cara pendapatan

Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh faktor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan.

Penduduk

Penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. Penduduk merupakan salah satu faktor produksi yang paling banyak kita miliki, yaitu faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja yang relatif banyak tersedia merupakan salah satu keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) bagi suatu negara atau daerah dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian output baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk. Adam Smith mengemukakan bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2010).

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah di nyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di Negara tersebut (Sukirno,2003). Maka disisi lain semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Saragih,2003)

Hubungan Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah

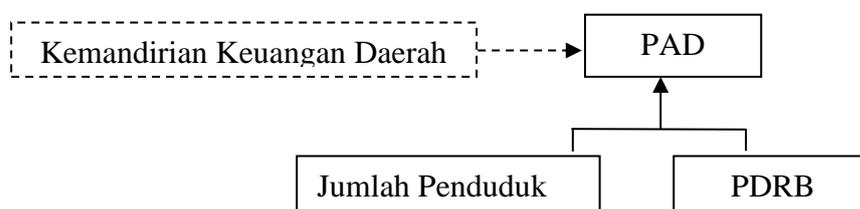
Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Murib dan Rosalina, 2018). Todaro (2003) juga mencatat bahwa pertumbuhan penduduk merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi, selanjutnya akan mendorong *economic of scale* dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi, dan pada akhirnya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan atas latar belakang, permasalahan, telaah pustaka dan kerangka pemikiran teoritis bahwa bahwa Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh variabel PDRB dan Jumlah Penduduk. Untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dapat dilihat melalui jumlah penerimaan PAD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap TPD, mengindikasikan bahwa daerah tersebut mempunyai tingkat kemandirian fiskal yang baik. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menggali faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD. Pada penelitian ini PDRB dan Penduduk dikaitkan apakah keduanya berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang merupakan suatu tolok ukur untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah. Sehingga hipotesis pada penelitian ini adalah

H₁ = Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H₂ = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Catatan:

----- : Analisis Deskriptif Kemandirian Keuangan Daerah

----> : PAD tolok ukur kemandirian fiskal

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa deret berkala (*time series*) dari tahun 2005-2019. Data tersebut meliputi data Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pati yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai tolok ukur kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau hasil dari pengumpulan suatu instansi dalam bentuk publikasi dari BPS terbitan tahun 2005-2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literatur yang mendukung. Data yang dikumpulkan menyangkut keseluruhan komponen data yang dibatasi dalam jangka waktu selama 15 tahun pengamatan yaitu tahun 2005-2019

Analisis Data

Alat analisis yang pertama digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah/ derajat desentralisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang dilakukan dengan menggunakan ukuran yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah. Perhitungannya menggunakan rasio PAD terhadap TPD yang nantinya disajikan dalam bentuk tabel. Hal ini bermanfaat untuk menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Pati terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu penelitian. Adapun untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal digunakan kriteria derajat desentralisasi daerah yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991).

Analisis kedua adalah analisis kuantitatif dengan regresi linier berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) menggunakan E-Views7 untuk mengetahui pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap PAD yang merupakan tolok ukur untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah. Data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Dengan menggunakan alat analisis tersebut dapat diperoleh koefisien pengaruh dari masing- masing variabel independen tersebut (Gujarati, 2003). Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengetahui besarnya pengaruh peubah bebas terhadap perubahan peubah tak bebas dapat dilihat dari koefisien determinasi (*coefficient of determination*) atau R^2 (Gujarati, 2003). Selain itu, uji hipotesis yang digunakan adalah uji statistik t untuk menguji koefisien regresi parsial dan uji F-statistik untuk menguji signifikansi secara simultan dengan tingkat signifikansi 5%. Uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas,

uji spesifikasi model, uji normalitas dan uji autokorelasi juga digunakan dalam penelitian ini. Jika syarat asumsi- asumsi linier berganda terpenuhi, maka parameter yang digunakan dalam model dapat ditaksir dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) (Gujarati, 2003).

Model Regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + e_t$$

Keterangan :

Y	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
B ₀	= Konstanta
β ₁ , β ₂	= Koefisien regresi
X ₁	= Jumlah Penduduk
X ₂	= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
e	= Standar Error

Variabel Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Variabel PAD dinyatakan dalam ribuan rupiah

Jumlah Penduduk

Merupakan jumlah orang yang tinggal dan menetap disuatu wilayah tertentu. Variabel jumlah penduduk dinyatakan dalam satuan jiwa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi disuatu wilayah tertentu atas dasar harga berlaku dalam jangka waktu tertentu. Variabel produk domestik bruto dinyatakan dalam ribuan rupiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan Uji VIF (Variance Inflating Factor). Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien VIF < 10 yaitu 1,00, maka kesimpulannya tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji White. Hasilnya menunjukkan bahwa Probabilitas Chi- Square sebesar 0.415 > 0.05, maka kesimpulannya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model.

c. Uji Spesifikasi Model

Uji spesifikasi model digunakan untuk menguji linieritas model, dalam penelitian ini menggunakan Uji *Ramsey Reset* yang dikenal dengan uji kesalahan spesifikasi umum atau *General test of specification error*. Hasilnya menunjukkan bahwa F- Statistik sebesar 0,722 > 0,05, maka kesimpulannya model linier (spesifikasi model benar).

d. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque Bera*. Hasilnya menunjukkan bahwa signifikansi statistik JB sebesar $0,703 > 0,05$, maka kesimpulannya distribusi ut normal.

e. Uji Autokolerasi

Dalam penelitian ini digunakan uji *Breusch-Godfrey* dalam menguji masalah autokolerasi. Hasilnya menunjukkan bahwa signifikansi sebesar $0,488 > 0,05$, maka kesimpulannya tidak terdapat masalah autokolerasi dalam model.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apakah variabel mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap variabel independen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesisi penelitian ini dinyatakan dalam model persamaan berikut:

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi

Hasil Regresi	Variabel			Prob.F Stat	R ²
	C	JP	PDRB		
Koefisien	-1472352	1.188880	0.009265	0,000000	0.936681
Prob.t-Stat	0.0147	0.0150	0,0000		

Sumber: Output olah data menggunakan E-views7

Berdasarkan regresi menggunakan E-views 7 maka persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Nasional} = -1472352 + 1.188880 \text{ JP} + 0.009265 \text{ PDRB} + e_t$$

Maka persamaan diatas dapat dijelaskan:

- Kostanta = -1472352, artinya apabila variabel Jumlah Penduduk dan variabel PDRB bernilai nol, maka PAD menurun sebesar -1472352
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Jumlah Penduduk sebesar 1.188880 maka hal ini mengandung arti jika Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 1.188880.
- Nilai koefisien regresi untuk PDRB sebesar 0.009265 maka hal ini mengandung arti jika PDRB meningkat sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0.009265

Berdasarkan hasil estimasi Tabel 5, besarnya koefisien determinasi R² sebesar 0.936. Artinya variasi faktor- faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati tahun 2005-2019 dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model statistik sebesar 93%. Variabel independen dalam model statistik yaitu Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDRB). Sedangkan sisanya 7% dijelaskan oleh faktor- faktor lain di luar model statistik pada penelitian ini.

Hasil Uji F menunjukkan nilai Probabilitas F-statistik yaitu sebesar 0.0000 dimana jauh lebih kecil daripada 0,05, maka hal tersebut menjelaskan bahwa variabel independen dari variabel Jumlah Penduduk dan PDRB secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu PAD.

Uji t digunakan untuk menjelaskan pengaruh secara individual atau parsial dari variabel independen, yaitu variabel Jumlah Penduduk dan PDRB. Diketahui bahwa jika nilai probabilitas variabel independen kurang dari 0,05 atau 5%, maka variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel 5 diatas bahwa nilai probabilitas dari variabel independen PDRB sebesar 0.01 dan nilai probabilitas Penduduk sebesar 0.00, yang artinya bahwa nilai keduanya dari variabel independen tersebut kurang dari 5% atau dibawah 5%, maka dapat diartikan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD. Sehingga disimpulkan bahwa kedua variabel independen (Jumlah Penduduk dan PDRB) tersebut berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (PAD)

Pembahasan

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam struktur keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai kemampuan riil keuangan daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD yang sah. Kemampuan keuangan daerah diukur dari tiga indikator yaitu besarnya PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD atau APBD), besarnya bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap TPD serta Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap TPD. Pada penelitian ini untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah menggunakan perbandingan antara PAD dengan TPD. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Jika kinerja keuangan daerah positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung otonomi daerah. Berikut gambaran kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pati pada Tahun 2005-2019.

Tabel 6
Rekapitulasi Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pati
Tahun 2005 – 2019 (Persen)

Tahun	PAD (Juta)	TPD (Juta)	DKF(persen)	Kriteria
2019	363.824,13	2.838.625,58	12,82	Kurang
2018	384.041,85	2.789.055,86	13,77	Kurang
2017	428.374,75	2.747.796,35	15,59	Kurang
2016	321.970,33	2.452.112,93	13,13	Kurang
2015	309.365,70	2.180.994,02	14,18	Kurang
2014	279.254,88	1.940.575,70	14,39	Kurang
2013	169.127,41	1.720.652,92	9,83	Sangat Kurang
2012	163.733,66	1.477.993,12	11,08	Kurang
2011	134.475,56	1.229.009,23	10,94	Kurang
2010	112.526,54	1.001.675,11	11,23	Kurang
2009	90.396,85	929.172,52	9,73	Sangat Kurang
2008	80.677,77	886.445,87	9,10	Sangat Kurang
2007	78.965,73	786.092,42	10,05	Kurang
2006	66.197,69	681.437,70	9,71	Sangat Kurang
2005	57.150,61	491.188,83	11,64	Kurang
Rata-Rata			11,81	Kurang

Sumber: BPS Kab. Pati

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada Tabel 6 di atas, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pati selama periode Tahun Anggaran 2005-2019 adalah 11,81 % sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah Kabupaten Pati dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pati selama periode Tahun Anggaran 2005-2019 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil uji parsial menunjukkan variabel Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai probabilitas 0,03. Dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riandani Rezki Prana yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah, maka penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat cenderung meningkat dan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Selain itu dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah penduduk berarti tinggi pula pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pati yang bersumber dari pajak yang dibayarkan atas jumlah penduduk yang tinggi tersebut. Artinya peningkatan Jumlah Penduduk akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati

Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil uji parsial menunjukkan variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan 0,00. Dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh Penelitian sebelumnya yang dilakukan Evi Adriani dan Sri Indah Handayani menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).). Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Artinya setiap orang yang menghasilkan barang dan jasa akan mendapatkan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan Metode *Ordinary Least Square* (OLS) , maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2019 tergolong kurang, hal tersebut didasarkan pada nilai rata-rata derajat kemandirian keuangan daerah pada periode observasi tersebut proporsi PAD terhadap TPD sebesar 11,81%. Hal ini berarti bahwa ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat relatif tinggi atau sebagian besar pembiayaan kegiatan pemerintah di daerah sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat baik DAU maupun DAK.
- b. Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah penduduk berarti tinggi pula pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pati yang bersumber dari pajak yang dibayarkan atas jumlah penduduk yang tinggi tersebut. Artinya peningkatan Jumlah Penduduk akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peran PDRB dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak sektor industri yang digunakan untuk pembangunan daerah berupa pembangunan infrastruktur dasar (misalnya pembangunan jalan, jembatan, sekolah, pelabuhan maupun infrastruktur penunjang lainnya) dan juga penyediaan fasilitas publik seperti dibidang kesehatan dan pendidikan. Semakin meningkatnya sektor PDRB dalam perekonomian maka secara otomatis akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah sekaligus akan menambah pendapatan daerah, ketika kegiatan ekonomi daerah meningkat, maka akan membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang pada akhirnya akan menambah pendapatan masyarakat, yang kemudian akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Kelebihan pada penelitian ini adalah tidak hanya menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah, tetapi dianalisis pula faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD, hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah. Sedangkan pada penelitian lainnya hanya menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah saja ataupun hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini jangka waktunya hanya 15 tahun penelitian, penambahan waktu diperlukan untuk melihat pengaruh informasi dalam jangka waktu yang lebih lama
- e. Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pati memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Pati bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya melalui serangkaian kebijakan dengan melibatkan segenap unsur masyarakat yang ada didaerah. Maka dengan demikian diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan akan meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

2. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memasukkan variabel yang lain yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah agar dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi PAD dengan segala kebijakannya dalam upaya melaksanakan amanah ototomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Evi dan Sri Indah Handayani, 2008, Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, Vol.8, No.2, Hal 1-6
- Aryanti, Eni dan Iin Indarti, 2009, Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang”, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala.
- Badan Pusat Statistik, 2005, Pati Dalam Angka 2005, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2006, Pati Dalam Angka 2006, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2007, Pati Dalam Angka 2007, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2008, Pati Dalam Angka 2008, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2009, Pati Dalam Angka 2009, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2010, Pati Dalam Angka 2010, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2011, Pati Dalam Angka 2011, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2012, Pati Dalam Angka 2012, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2013, Pati Dalam Angka 2013, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2014, Pati Dalam Angka 2014, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2015, Pati Dalam Angka 2015, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2016, Pati Dalam Angka 2016, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2017, Pati Dalam Angka 2017, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2018, Pati Dalam Angka 2018, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2019, Pati Dalam Angka 2019, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2020, Pati Dalam Angka 2020, Pati : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2018, Jawa Tengah Dalam Angka 2018, Semarang : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2019, Jawa Tengah Dalam Angka 2019, Semarang : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2020, Jawa Tengah Dalam Angka 2020, Semarang : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2018, Statistik Indonesia 2018, Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2019, Statistik Indonesia 2019, Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2020, Statistik Indonesia 2020, Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. (1991), Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta: Universitas Gajah Mada
- Gujarati, Damodar, 2003, Ekonometrika Dasar, Jakarta: Erlangga
- Hasanur, Dedek dan Zainal Putra, 2017, Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Kawasan Barat Selatan Aceh). Jurnal E-KOMBIS, Volume III, No.2, Hal 46-59

- Juliansyah, Hijri dan Sukadria, 2018, Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* Volume 01 Nomor 02, Hal 58-63
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*, Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2011, *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*, Yogyakarta: UPP YKPN
- Makdalena , F Asmuruf, Vikie A. Rumate, dan George M.V. Kawung, 2015, Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 15 No. 05, Hal 727-723
- Murib, Demintianus, Rosalina A.M Koleangan dan Krest D. Tolosang, 2018, Pengaruh Jumlah Pendeuduk, Pendapatan Perkapita, PDRB Terhadap PAD Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 18 No 01, Hal,23-33.
- Musgrave, Richard A and Musgrave, Peggy B, 1991, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga
- Nur, Idham Iman, Ima Amaliah, dan Meidy Haviz, 2017, Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017 Number of Population, GDP and Regional Expenditure on Local Own-source Revenue (PAD) in Bandung Regency Year 2000-2017 Prosiding Ilmu Ekonomi ISSN: 2460-6553.
- Perwira, Ryan, Ridwan dan Vitayanti Fattah, 2018, Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan Dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah, *E Jurnal Katalogis*, Volume 6 Nomor , Hal 1-15
- Rezki , Riandani Prana , Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi, *Jurnal Ilman*, Vol. 4, No. 1, ISSN 2355-1488, Hal 74-86
- Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sukirno, Sadono, 2003, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Penerbit PT. Salemba
- Sukirno, Sadono, 2004, *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono, 2010, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda
- Suyanto, 2010, Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 11, Nomor , Hal.69-92
- Todaro, Michael. P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*, Jakarta : Erlangga
- Todaro, Michael . P, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi kedelapan*, Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah